

Penerapan Kebijakan *MBKM* Pada Mutu Pendidikan Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan

Muhammad Ubaidillah¹, Muwafiqus Shobri²

Abstract, *This research aims to describe one implementation of the MBKM policy which is designed to help students optimally in one choice to focus on appropriate scientific competencies. In an implementation of MBKM decision making on the quality of student education at Yudharta Pasuruan University. A concept that promotes independent learning and efforts to prepare graduates in higher education to be ready to face global developments and changing times. This research uses a qualitative approach. with this type of analytical phenomenon research. Meanwhile, the data collection procedure is a case study in collecting data as the main source of this research so that this research has high validation according to what happens in the field. The results of this research show that the implementation of MBKM at Yudharta Pasuruan University includes: 1) MBKM policy planning on educational quality through student exchanges, and 2). implementation of MBKM policies on educational quality through student exchanges*
Keywords: *MBKM policy, quality of student education*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu di tingkat pendidikan sebagai satu faktor penting untuk menentukan kesuksesan dimasa depan. Hal ini, budaya serta pemanfaatan suatu Negara yang berkelanjutan, berkemajuan dalam IPTEK, serta perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting³. Kalau dilihat dari mutu pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki tujuan dalam membentuk mahasiswa, oleh karena itu, dapat secara aktif dan dapat menyesuaikan dengan keadaan kebaruan, penyesuaian karakteristik dapat dibutuhkan dan berkembang di suasana kampus⁴.

Adapun filosofi munculnya pengambilan keputusan atau kebijakan MBKM dimulai pada 2020. Adapun yang semua memiliki harapan menjadi jalan keluar kepada situasi dan kondisi yang belum meratanya dalam mutu pendidikannya. diantaranya capaian hasil Survei PISA 2020 bahwa Negara Indonesia menduduki rangking 10 terbawah dari 80 negara yang dapat berpartisipasi, kerangka pendidikan agar dapat lebih unggul dan sejahtera⁵. Bahkan akibat masa Pandemi Covid-19, pendidikan di Negara Indonesia mengalami *learning loss* yang lumayan besar. Kebijakan MBKM itu telah diusung pada Presidensi G20 “*Recover Together, Recover Stronger*” (*Sherpa Track*) pada agenda yang telah dibahas dalam mengusung bidang pengembangan pendidikan. Agenda yang menjadi prioritas tersebut dapat dikemas dalam pengambilan keputusan MBKM. Kebijakan tersebut dapat diteruskan dan dilaksanakan dalam penyempurnaan agar menjadi lebih baik, lebih merata, dan transparan⁶.

¹ Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda`wah Bangil Pasuruan, Email : ubaidillahmuhammad01@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Hasan Jufri Bawean Gresik, Email : dosensukses@gmail.com

³ Anwar, R. Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2021. 9(1), 210–219. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>

⁴ Baro`ah, S. Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 2020. 1063–107

⁵ Kemendikbudristek. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020

⁶ Fatah, A. Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2021

Tetapi yang menunjukkan menjadi sikap positif Mendikbudristek kepada kebijakan MBKM ini tidak dibarengi tata kelola yang baik, dengan melalui perencanaan yang matang dan cepat di lapangan. Sehingga mengakibatkan kebijakan ini terkesan kurang siap dikonsepsi dalam pelaksanaannya. Di samping itu Indonesia memiliki tugas yang sangat besar untuk membangun karakter sebagai jati diri bangsa melalui pendidikan dan pembelajaran yang tersedia bagi *stakeholders*, sehingga dapat terbentuk masyarakat yang dapat memiliki pendidikan yang memadai⁷. Oleh karena itu, di Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa sebagai kewajiban negara kepada bangsanya dibidang pendidikan memiliki asas yang sangat mendasar karena negara dibentuk dalam mencerdaskan kehidupan warganya, sebagaimana tertuang di pertimbangan Putusan MK No. 012/PUU-II/2006⁸. Merupakan sebagai bukti kenegaraan bahwa mandat ini sedang dilaksanakan dengan efektif.

Kemendikbudristek mengusulkan tentang strategi MBKM untuk menanggapi persoalan yang dihadapi pendidikan Indonesia. Pada dasarnya Gagasan tersebut dapat memberikan kemandirian kampus khususnya mahasiswa pada saat mereka lulus. Prosedur maupun konsep mutu pendidikan tersebut sebagai salah satu inovasi pendidikan, agar mahasiswa mendapatkan mutu pendidikan yang kompeten untuk peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal⁹.

Penerapan Kebijakan MBKM di universitas sebenarnya telah diterapkan Tahun 2020 berdasarkan pada kebijakan merdeka-belajar ini mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan ristik pendidikan tinggi nomer 3,4 pada tahun 2020 pada permendikbudristek itu diatur mengenai standarisasi pendidikan, penerimaan mahasiswa baru. Penerapan MBKM merupakan sebagai langkah penting untuk menempatkan mahasiswa pada proses pendidikan, yang sangat penting dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat menumbuhkan kompetensi, inovatif dan kepribadian, kebijakan MBKM dapat menghadirkan pada pertumbuhan yang dapat memberikan pengetahuan yang maksimal dan menjanjikan. Pertukaran mahasiswa, pengajaran di kampus, magang, dan studi independen bersertifikat merupakan tiga inisiatif penting pada MBKM yang berkontribusi pada fakta di lapangan¹⁰.

MBKM sebagai alat yang terbaik untuk dipersiapkan kepada mahasiswa dalam kehidupan sesudah selesai ketika di bangku kuliah. Adapun Untuk memulai *stakeholders* harus dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk memberi bekal kepada lulusan saat ini dengan *skill* keras dan lunak yang mereka perlukan dalam karirnya¹¹. Sedangkan tantangan yang dihadapi masih ada kendala, dengan adanya pengelolaan dalam hal penyesuaian Mata Kuliah yang perlu disesuaikan dengan kurikulum MBKM dan masih banyaknya Dosen, dan sarana prasana yang perlu ditingkatkan untuk menunjang kepada penerapan kebijakan MBKM. Dari adanya kekurangan dan kelebihan dapat menjadikan

⁷ Rahmawati, A. N. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2021. 2(4), 59–66.

⁸ Nanggala, A. Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020. 9(2), 10-23.

⁹ Rosmiati, P. Pengukuran Mutu Pembelajaran di FKIP UNJA dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen yang Mengelaborasi Program MBKM Kemendikbud. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021. 5256 - 5264

¹⁰ Siregar, A. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: *Journal of Islamic Education*, 2020. 1(1), 141-157.

¹¹ Kurniasari, E. Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. 10 Nomor 3. *Publika*, 2022. 981-994. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47476/39707>

universitas sebagai pedoman dalam melakukan MBKM yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi budaya lingkungan dalam menetapkan strategi yang akan diterapkan.

Di salah satu universitas swasta di Indonesia, Universitas Yudharta menyontoh apa yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM sejak awal tahun akademik 2022, sehingga dapat memudahkan mahasiswa untuk menempuh mata kuliah non gelar hingga 3 semester. Penerapan MBKM ditahun 2020 setelah covid 19 berjalan dengan sebagaimana semestinya berdasarkan panduan MBKM yang telah dirilis oleh kemendikbudristek. Universitas Yudharta memiliki dedikasi dan filosofinya untuk menyediakan pendidikan MBKM, dan telah menerapkan kebijakan ini melalui sejumlah inisiatif untuk mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Yudharta Kabupaten Pasuruan. Universitas dapat memberikan kemerdekaan kepada mahasiswa untuk menentukan metode pembelajaran secara merdeka, untuk itu jika memungkinkan mahasiswa dapat melakukan lintas kegiatan disiplin untuk mendapatkan pengetahuan serta keterampilan disesuaikan dengan bakat dan minatnya ketika bangku kuliah.

Universitas Yudharta Pasuruan menyadari dengan adanya potensi kebijakan universitas belajar merdeka yang berfungsi sebagai corong pada mutu pendidikan untuk mahasiswanya dengan dinamika yang ada dilapangan misalnya keterampilan, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, bimbingan kinerja, serta pencapaian ketika kuliah berfflangsung. Agar penerapan kebijakan MBKM terpenuhi pada sistem pendidikan. Sedangkan mata kuliah dari kurikulum MBKM yang diadopsi sedang disesuaikan kebutuhan. Sehingga mahasiswa, dan dosen di Universitas Yudharta yang masih membutuhkan *workshop* dan seminar agar dapat menyesuaikan dengan penerapan kebijakan MBKM.

Jika ini benar, sangat bertolak belakang dengan pengambilan kebijakan dan pedoman yang sudah ditetapkan. namun kebijakan publik merupakan sebagai seperangkat hukum yang dibuat untuk kepentingan sosial. Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada seperangkat aturan yang ditetapkan dan diterapkan untuk kepentingan semua orang. Pengambilan kebijakan mutu pendidikan pada mahasiswa mengacu pada tindakan pemerintah dan niat untuk menentukan tindakan serta memilih tujuan dan alternatif dalam pembuatan kebijakan¹². Kebijakan publik merupakan “*Whatever governments choose to do or not to do*”. Yang mungkin dapat terlihat menyiratkan karena kebijakan pemerintah sepenuhnya bersifat diskresi. Kebijakan publik sebagai upaya untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah, mengapa melakukannya, dan apa yang menyebabkannya berperilaku seperti itu. Akibatnya, tidak selalu mungkin untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan adanya proses serta peraturan yang ditetapkannya. Oleh hal tersebut dapat dikembalikan lagi kepada instansi atau wilayah, terkait dalam menerapkan kegiatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangannya. Setelah itu keputusan tersebut dapat diterapkan di universitas¹³.

Penerapan kebijakan pada mutu pendidikan sebagai serangkaian proses kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan oleh organisasi pendidikan dimana dalam mengabil dan menerapkan program kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh kementerian, dinas

¹² Khotimah, N. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sd Negeri 014 Palembang Sumatera Selatan. Sinar Sang Surya (*Jurnal Pusat PKM*), 5(2), 2021. 194–204. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1700/1113>

¹³ Fuadi, T. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kedala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2021. 603–614.

pendidikan, maupun organisasi lain yang berkaitan¹⁴. Penerapan dan pengambilan kebijakan dapat memperhatikan beberapa hal diantaranya tujuan dalam penerapan kebijakan tersebut. Ada beberapa aspek diantaranya: 1) komunikasi, jika terjalin komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana, tujuan program. 2) SDM, teknologi, dan keuangan organisasi sangat diperlukan untuk menerapkan kebijakan mutu pendidikan. 4) perilaku, tujuan ini ditekankan pada bagaimana karakteristik untuk menerapkan kebijakan dengan adanya komitmen, serta demokratis¹⁵.

Penerapan mutu pendidikan pada pengambilan kebijakan MBKM dengan kurikulum sebelumnya tentu berbeda, MBKM lebih memerdekakan mahasiswanya untuk belajar diluar prodi dan mengikuti berbagai program dari Universitas maupun dari Kementerian. Proses belajar saat Sebelum adanya Kebijakan MBKM Masih mewajibkan mahasiswa untuk terus belajar dalam prodi selama 8 semester . Namun, disituasi saat ini penerapannya bisa diluar prodi dan ikut kegiatan kementerian.

METODE PENELITIAN

Penggunaan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif . Adapun prosedur pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Universitas Yudharta Kabupaten Pasuruan, sebagai sumber penting dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini validasi yang tinggi sesuai yang terjadi di lapangan. Sedangkan jenis penfelitian menggunakan studi kasus yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Belajar (MBKM)

Sebagai otonomi didunia kampus, mahasiswa merupakan sebagai respon kepada adanya tuntutan Revolusi Industri Kelima, pada saat ini pekerja sangat diperlukan secara kontinyu untuk mempelajari *skill* baru, berpikir kritis, energik, serta berkolaborasi secara efektif¹⁶. Dalam pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa¹⁷. Universitas yang mandiri merupakan sebagai Salah satu kebijakan bapak menteri Nadiem Anwar Makariem "Merdeka"¹⁸. Adapun Kebutuhan yang telah diinginkan untuk dipenuhi oleh pengmbil kebijakan MBKM. Diantara tujuan Kampus Merdeka, model Universitas yang mandiri dan adaptif, untuk menumbuhkan lingkungan pendidikan yang inovatif, kreatif, bebas, dan berpusat ke mahasiswa. Kebutuhan tersebut untuk dipenuhi oleh Kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Merdeka.

Kebijakan MBKM dapat menjamin kesempatan mahasiswa untuk menempuh sampai 3 semester dimata kuliah yang tidak termasuk dalam kurikulum resmi. Untuk meningkatkan standar pendidikan dan lulusan Universitas, program tersebut diwajibkan oleh peraturan

¹⁴ Asmara, A. Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 2020. 1 (1),37-46.

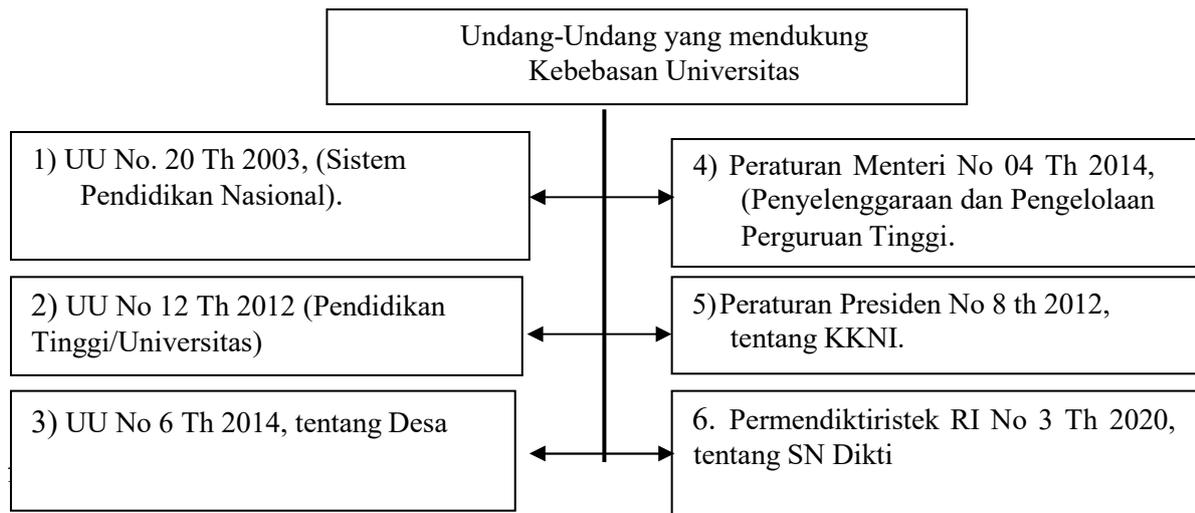
¹⁵ Nofia, N. Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2020. 61-72.

¹⁶ Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment Policy Implementation In Indonesia. *The Journal Of Asian Finance, Economics, and Business*, 2021. 8 (6), 1213- 1223.

¹⁷ Siregar, A. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2020. 1(1), 141-157.

¹⁸ Baharuddin. Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 2021 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>

perundang-undangan. Berikut teks undang-undang yang yang dapat mendukung kebebasan Universitas sebagai tempat mahasiswa mencari ilmu¹⁹



Undang-Undang yang mendukung Kebebasan Universitas/Kampus

Adapun tujuan pengambilan kebijakan MBKM dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah pilihan selama 3 semester di luar prodinya, dalam meningkatkan kemampuan kerja dan kompetensi menyesuaikan saat dunia memasuki revolusi industri kelima 5.0. mendidik untuk menjadi pemimpin yang dapat dan memiliki kompetensi, bermoral tinggi di dunia industri. Potensi mahasiswa dapat dipupuk sesuai dengan minat dan kekuatannya melalui program yang telah menyediakan perencanaan dalam mutu pendidikan individual. Adapun selama periode 3 semester, mahasiswa memiliki pilihan untuk terlibat dalam kegiatan diantaranya pertukaran mahasiswa, pertukaran mahasiswa merdeka merupakan program selama 1 semester, mahasiswa dari kelompok regional yang berbeda melakukan perjalanan satu sama lain untuk belajar tentang budaya yang berbeda dan bertukar hingga 20 kredit kursus senilai.

2. Mutu Pendidikan Mahasiswa

Mutu pendidikan mahasiswa merupakan sebagai salah satu pilar pokok atau tonggak dalam membangun pendidikan di dunia kampus, jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif dan kompetitif. Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia (pasal 1 Nomor 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan pasal 3 PP.19/2005 tentang SNP), Standar Nasional Pendidikan dapat berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, penerapan, dan pengendalian pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar mutu pendidikan ini diperlukan sebagai barometer dinamika progresifitas pendidikan²⁰

Mutu pendidikan mahasiswa mencakup input, proses dan output pendidikan, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang

¹⁹ Andi, M. *Panduan Operasional Baku (POB) Pertukaran Mahasiswa Merdeka*. 32. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/assets/pertukaranMahasiswaMerdeka/assets/POB-Pertukaran-fMahasiswa-Merdeka.pdf>. 2021

²⁰ Aan, W. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan*, 2021. 16 (2), 102–107. <https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125>

baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil (*out put*) harus dirumuskan lebih dahulu²¹. Mutu pendidikan merupakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai etika mulia, yang keseluruhannya merupakan sebagai kecakapan hidup (*life skill*), pendidikan yang menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (*integrated personality*) mereka memiliki kompetensi keimanan tinggi, ilmu, dan amal²².

Pada dasarnya adanya mutu pendidikan sangat berkaitan dengan pencapaian pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan, di dalam rencana strateginya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditentukan. Adapun jaminan mutu pendidikan berkaitan dengan holistik dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan/dijalankan²³. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan. Dengan demikian penjaminan mutu pendidikan merupakan proses penetapan dan pemenuhan standard mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*contibuos quality improvemen*). Pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas jika: 1) lembaga mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui penerapan misinya. 2). Lembaga mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* berupa a. kebutuhan masyarakat, b. kebutuhan dunia kerja, dan c. kebutuhan dalam kemampuannya²⁴.

3. Perencanaan Kebijakan pada Mutu Pendidikan Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan

Perencanaan merupakan sebagai salah satu fungsi alamiah dalam pengelolaan, sebagai bagian holistik dari kegunaan secara alami lainnya dalam tata kelola. Adapun prosedur kerja perencanaan dapat diterima serta adanya masukan dari kegunaan tata kelola lainnya, dari kegunaan alami pengorganisasian dapat diterima masukan yang berupa tujuan organisasi, dari tujuan alami dapat dikendalikan dan menerima masukan sebagai umpan balik berupa laporan hasil pelaksanaan dalam perencanaan. adapun masukan dari kegunaan tersebut, *daily activity* yang direncanakan juga memerlukan alat yang antara lain program pengajaran tenaga, teknik, instrumen, nilai-nilai budaya dan biaya yang akan direncanakan. Di dalam Proses pemilihan penetapan tujuan, strategi, teknik, anggaran, serta standar sebagai tolok ukur adanya keberhasilan dalam sesuatu kegiatan²⁵. Perencanaan merupakan sebagai adanya rangkaian dari beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa solusi tentang tujuan yang dapat dicapai oleh budaya organisasi. Selanjutnya dapat memilih teknik agar tercapai tujuannya. Di dalam pemilihan tersebut dapat menetapkan kegiatan, kemudian apa yang harus dikerjakan, bagaimana dan oleh siapa. Untuk itu proses yang tidak berakhir apabila perencanaan itu sudah ditetapkan²⁶. Setiap saat selama proses pengawasan, perencanaan dapat memerlukan perbaikan agar tetap bermanfaat. Kadang menjadi faktor kunci agar kompetensi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

²¹ Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment Policy Implementation In Indonesia. *The Journal Of Asian Finance, Economics, and Business*, 2021. 8 (6), 1213- 1223. <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO2021115563460873.page>

²² Wahyudi, A. Strategi Pengelolaan Vocational Life Skill Pada Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 2021. 39–45. 2021

²³ Unusa. *Buku Pedoman Pemutakhiran Kurikulum dan Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya*. Surabaya: Unusa. 2020

²⁴ Muhajir, Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring Selama Covid-19. . In I. Juwarirah, *Implementasi dan Problematika Merdeka Belajar* (pp. 85-91). Tulungagung: Akademia Pustaka. 2021

²⁵ Nanggala, A. Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020. 9(2), 10-23.

²⁶ Rosmiati, P. Pengukuran Mutu Pembelajaran di FKIP UNJA dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021. 5256 - 5264

Di dalam rencana kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa dilakukan dalam pertukaran dapat diselenggarakan dalam membentuk sikap mahasiswa yang tertuang di dalam Permendikbud No 3 Th 2020, antara lain dapat bertoleransi dalam nilai-nilai budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan yang asli pada orang lain; dapat bekerjasama, peka terhadap sosial sekitarnya, serta adanya kepedulian kepada masyarakat sekitarnya²⁷. Sedangkan ketentuan program studi sebagai berikut :

| No | Konsep yang akan dilakukan Program Studi |
|----|--|
| 1 | Konsep kampus pertukaran mahasiswa melalui kerjasama antara program studi baik di dalam maupun di luar |
| 2 | Program studi pengirim sebagai program studi asal dari mahasiswa sedangkan program studi penerima adalah program studi di dalam dan di luar Universitas yang menjadi tujuan mahasiswa. |
| 3 | Pengalihan Angka Kredit sebagai pengakuan dari hasil proses pendidikan yang dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester agar tercapai kemampuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum |
| 4 | Pemerolehan Angka Kredit merupakan sebagai pengakuan dari hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester agar memperkaya apa yang akan dicapai dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum. |
| 5 | Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda. |

Tabel : 1.1. Konsep yang akan dilakukan Program Studi

Sedangkan adanya pertukaran mahasiswa memiliki tujuan antara lain : 1) mahasiswa belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal di wilayah kampus yang dituju, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan semakin maju dan berkembang, ikatan persaudaraan lintas budaya, suku semakin kokoh. 2) dapat Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan yang dapat menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, serta kondisi perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri.

Bentuk perencanaan kebijakan pada mutu pendidikan menggunakan pendidikan yang dapat dipelajari mahasiswa dalam memberi hasanah pengalaman dan keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang memiliki ciri khas yang dapat menunjang pendidikan maupun pembelajaran untuk mengoptimalkan capaian pendidikan dan pembelajaran. Dalam penyusunan dapat disesuaikan dengan kurikulum yang menjadi jalan keluar bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di bidang studi yang sama di luar kampus. Adapun tujuan lainnya untuk Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi tujuan, yaitu kesepakatan tentang perencanaan dalam pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama bilateral, asosiasi, klaster, atau zonasi yang disesuaikan dengan wilayah terdekat. sedangkan pengaturan kuota anggota yang mengambil mata kuliah dapat ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam bidang studi. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan di bidang studi yang sama pada perguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan akademik kampus .

Kegiatan pendidikan dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar dapat dilaksanakan secara tatap muka atau daring dengan ketentuan yang berlaku bahwa mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbudristek. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Yudharta Pasuruan memiliki salah satu capaian pembelajaran antara lain dapat menguasai prosedur tentang yang dibutuhkan

²⁷ Universitas Yudharta. *Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Pasuruan. Universitas Yudharta. 2020

informasi dan pengambilan kebijakan dalam komunikasi²⁸. Adapun cara dalam bentuk pembelajaran pertukaran pelajar dalam program MBKM sebagai berikut:



Gambar .1.1. Metode Pertukaran Mahasiswa

Tugas lembaga pengelola pertukaran mahasiswa di Universitas Yudharta antara lain : a) adanya kerjasama antar perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa. b) dapat dialokasikan kuota mahasiswa yang mendaftar mengikuti perkuliahan di luar. c) jika dibutuhkan, penyelenggaraan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi dasar keadilan kepada mahasiswa. 4) melaksanakan observasi dalam menyelenggarakan pertukaran mahasiswa. 5) adanya penilaian serta evaluasi dari hasil pertukaran mahasiswa, kemudian dilakukan rekognisi pada sks mahasiswa. 6) dapat melaporkan dari hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi²⁹.

4. Penerapan Kebijakan pada Mutu Pendidikan Mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan.

Penerapan Kebijakan pada mutu pendidikan melalui kerangka holistik pendidikan yang dibenturkan dengan perubahan kebijakan kurikulum. Dalam Ironisnya belum optimalnya kebijakan pendidikan dapat sering kali hanya sebab adanya pergantian kementerian. Ganti menteri ganti juga dalam pengambilan keputusan pendidikan. Adapun istilah yang berkembang di kalangan masyarakat pada saat adanya pergantian pimpinan “Ganti Presiden, Ganti Menteri, Ganti Kebijakan” menjadi benar adanya. Seperti hadirnya kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sehingga Merdeka Belajar memiliki tujuan mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kampus/atau sekolah, dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi program pendidikan. tetapi kita harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nasional pendidikan.

²⁸ Kemendikbudristek. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020

²⁹ Suhartoyo, E. Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 2020. Vol. 1(3), 161–164,

Civitas akademika Universitas Yudharta Pasuruan merupakan sebagai salah satu pintu gerbang kewibawaan lembaga penghasil pendidik yang perlu memahami kemamandirian di kampus, sebagai program kampus mandiri di bidang pendidikan tinggi. Adapun yang dapat diperoleh dari penelitian empiris pada upaya Universitas Yudharta Pasuruan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan mahasiswa dengan mengadopsi kebijakan pembelajaran kampus otonom

1) Komunikasi

Komunikasi yang tepat merupakan salah satu aspek yang penting dari penerapan kebijakan. Kelembagakan kebijakan Belajar Mandiri - Kampus Mandiri, dengan dicetuskan Kebijakan tersebut menginginkan mahasiswa bisa terampil serta dapat meningkat mutu pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka selanjutnya kebijakan tersebut disampaikan ke semua perguruan tinggi negeri atau swasta diseluruh Indonesia³⁰. Sedangkan Proses pemberi informasi dapat Menunjukkan bahwa dengan adanya proses komunikasi yang inten dilakukan oleh pihak kampus Perihal Program MBKM Berjalan dengan semestinya.

Komunikasi dalam penerapan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan merupakan Program Khusus yang dikomunikasikan dengan baik dan melibatkan para pihak pelaksana kebijakan. Hal komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap tanggapan dari para pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakan³¹.

2) Sikap atau tingkah laku

Sikap atau tingkah langkuh pada saat penerapan kebijakan mutu pendidikan sangat penting dan dibutuhkan, karena dengan adanya sikap yang baik dari penyelenggara kebijakan sampai penerima maka dapat dibilang penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif³². Universitas Yudharta dapat menerapkan kebijakan belajar merdeka secara maksimal berkat pemberian kebebasan akademik kampus bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan motivasinnya kepada mahasiswa³³. Penerapan kebijakan MBKM Merdeka di Universitas Yudharta terus selalu *memonitoring* serta mengawasi pada setiap lini. Kemudian Setelah adanya pengawasan, maka pihak kampus menemukan berbagai kendala-kendala yang perlu dibenahi sesegera mungkin agar Universitas Yudharta dapat dan mampu menerapkan kebijakan MBKM pada mutu pendidikan dengan baik serta dapat sebagai faktor mutu pendidikan mahasiswa.

Misalnya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Politik Universitas Yudharta Pasuruan, menyelenggarakan Seminar Hasil Kegiatan MBKM. Kegiatan ini dilaksanakan di *Hall Metting* Lantai 3, Gedung Nusantara Universitas Yudharta Pasuruan. Turut hadir Dekan Fisip, beserta seluruh kepala prodi pada kesempatan ini. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi, sedangkan peserta yang diuji

³⁰ Fuadi, T. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kedala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2021. 603–614

³¹ Kurniasari, E. Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. 10 Nomor 3. *Publika*, 2022. 981-994. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47476/39707>

³² Fatah, A. Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran. Malang: Universitas Negeri Malang*. 2021

³³ Nofia, N. Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2020. 61-72.

adalah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKNT (*Studi Independent*), dan proyek kemanusiaan. Kegiatan ini dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Dekan, dan Sambutan Kepala Prodi Komunikasi, kemudian presentasi dari kelompok yang ditentukan. Riska selaku peserta Studi Independen, mengemukakan merasa senang dalam kegiatan ini, karena kita langsung praktik, banyak pengalaman, banyak cennel, sehingga pelajaran yang kita dapat sangat riil sekali.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dapat dilakukan secara optimal serta dapat ditarik kesimpulan tentang penerapan kebijakan peningkatan mutu peendidikan mahasiswa di Universitas Yudharta *pertama*, perencanaan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa dilakukan dalam pertukaran dapat diperoleh melalui perilaku mahasiswa yang tertuang di dalam Permendikbudristek No 3 Th 2020, antara lain dapat menghargai nilai-nilai budaya, agama, serta pendapat orang lain, dapat saling bekerjasama, peka kepada sosial, memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitarnya.

Kedua, penerapan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa merupakan sebagai kewibawaan kampus sebagai penghasil pendidik yang dapat dipahami dalam sikap kememandirian di universitas, sebagai rencana dan konsep universitas mandiri di bidang perguruan tinggi. Adapun yang dapat dihasilkan dari lapangan pada upaya Universitas Yudharta Pasuruan: 1) komunikasi, dalam penerapan kebijakan pada mutu pendidikan mahasiswa di Universitas Yudharta Pasuruan merupakan Program Khusus yang dikomunikasikan dengan baik dan melibatkan para pihak pelaksana kebijakan. 2) perilaku pada saat penerapan kebijakan mutu pendidikan sangat penting dan dibutuhkan, oleh sebab itu dengan adanya perilaku yang terbaik dari penyelenggaraan pengambilan kebijakan sampai pemakai, maka dapat dibbilang penerapan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan, W. Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar. *Metodik didaktik Jurnal Pendidikan*, 2021. 16 (2), 102–107. <https://doi.org/10.17509/md.v16i2.30125>
- Andi, M. *Panduan Operasional Baku (POB) Pertukaran Mahasiswa Merdeka*. 32. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/assets/pertukaranMahasiswaMerdeka/assets/POB-Pertukaran-Mahasiswa-Merdeka.pdf>. 2021ffff
- Anwar, R. Pelaksanaan Kampus Mengajar Angkatan 1 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 2021. 9(1), 210–219. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i1.221>
- Asmara, A. Pentingnya Riset Kebijakan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Unggul di Indonesia. *JPSI (Journal Of Public Sector Innovations)*, 2020. 1 (1),37-46.
- Baro'ah, S. Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 2020. 1063–107
- Baharuddin. Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 2021 195–205. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591>
- Fatah, A. Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*. Malang: Universitas Negeri Malang. 2021

- Fuadi, T. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan dan Kendala Yang Dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2021. 603–614.
- Kemendikbudristek. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik No 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta. 2020
- Khotimah, N. Pelaksanaan Program Kampus Mengajar Di Sd Negeri 014 Palembang Sumatera Selatan. *Sinar Sang Surya (Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)*,5(2), 2021. 194–204. <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/sinarsangsurya/article/view/1700/1113>
- Kurniasari, E. Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi Covid19 Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan. 10 Nomor 3. *Publika*, 2022. 981-994. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/47476/39707>
- Nanggala, A. Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2020. 9(2), 10-23.
- Muhajir, Implementasi Merdeka Belajar Dalam Pembelajaran Daring Selama Covid-19. . *In I. Juwarirah, Implementasi dan Probelematika Merdeka Belajar (pp. 85-91). Tulungagung: Akademia Pustaka. 2021*
- Nofia, N. Analisis Tantangan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Islam Negeri Di Indonesia. *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2020. 61-72.
- Rahmawati, A. N. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 2021. 2(4), 59–66.
- Rosmiati, P. Pengukuran Mutu Pembelajaran di FKIP UNJA dalam Upaya Membangun Generasi Economic Citizen yang Mengelaborasi Program MBKBM Kemendikbud. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2021. 5256 - 5264.
- Siregar, N. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2020. 1(1), 141-157.
- Suhartoyo, E. Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 2020. Vol. 1(3), 161–164,
- Sulila, I. The Influence of Structure, Resources, Disposition and Communication on Small and Medium-Sized Enterprises Empowerment Policy Implementation In Indonesia. *The Journal Of Asian Finance, Economics, and Business*, 2021. 8 (6), 1213- 1223. <https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO202115563460873.page>
- Tatang Aulia Rahman, & Mumtahanah, N. (2023). Manajemen Pendidikan Perspektif Islam. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(01), 91-110.
- Universitas Yudharta. *Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Pasuruan. Universitas Yudharta. 2020
- Unusa. *Buku Pedoman Pemutakhiran Kurikulum dan Model Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya*. Surabaya: Unusa. 2020
- Wahyudi, A. Strategi Pengelolaan Vocational Life Skill Pada Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 2021. 39–45. 2021